

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN MUT'AH

DALAM PUTUSAN MA RI NO. REG. 441 K/ AG/ 1996



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Islam Pada Fakultas Agama Islam
Dan Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

RIZQIA ANNISA PARAMITA

I.000.050.008 / C.100.060.403

TWINNING PROGRAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM-HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia baik perseorangan maupun kelompok dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kehormatan dan kedudukan mulia. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.

Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab qabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula di hadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (walimah). Hak dan kewajiban suami istri timbal-balik diatur amat rapi dan tertib, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya.¹

¹ Ahmad Azhar Basyir, 2004 "*Hukum Perkawinan Islam*", Yogyakarta: UII Pres, Hal 1.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1,

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kehidupan yang kekal abadi bagi pasangan suami istri yang sah menurut hukum Islam maupun hukum Negara. Keluarga yang kekal abadi, bahagia sejahtera merupakan diantara sekian banyak dari tujuan perkawinan (pernikahan) dalam agama Islam.

Di dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk menikah dengan maksud untuk menggapai ketentraman berkeluarga yang kekal, abadi selamanya.²

Ayat-ayat tersebut diantaranya adalah³ ;

1) QS. Ar-Rum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

² Mohd.Idris Ramulyo, 2002 “*Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Hal 98.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, Hal 2

2) QS. An-Nisa (4) : 19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Hal ini dipicu karena salah satu dari mereka tidak melaksanakan kewajibannya, sikap kurang saling mempercayai, saling curiga, mau menang sendiri dan sebagainya. Karena itu, jika sekiranya dalam kehidupan rumah tangga terjadi perselisihan, hendaknya segera diupayakan jalan perdamaian, solusi dan penyelesaian permasalahan dengan dimusyawarahkan dengan pihak-pihak terkait.

Jika hal tersebut tetap sulit dilakukan, maka kedua belah pihak dapat mencari atau menunjuk juru damai, baik itu perorangan maupun lembaga atau instansi guna mendapatkan nasehat-nasehat dan jalan keluar dari kemelut dan permasalahan yang dihadapi.

Apabila berbagai daya upaya sudah dilakukan untuk mendamaikan keduanya tapi tetap bersikeras untuk berpisah (cerai), maka islam memberi

pedoman dan arahan bahwa perceraian itu dibenarkan dan dibolehkan jika kalau perceraian itu dianggap lebih baik dari pada mempertahankan perkawinan tersebut.

Meskipun Islam memperbolehkan perceraian dan syari'atnya ada, akan tetapi perceraian itu sebagai alternatif terakhir bagi suami istri yang gagal membina rumah tangga, tetapi bukan berarti cerai dalam Islam legal dan menyukai perceraian dari suatu perkawinan.

Untuk menjaga agar perceraian jangan terlalu mudah terjadi dan dengan pertimbangan masalah mursalah maka perceraian apapun bentuknya duharuskan melalui satu pintu yaitu institusi pengadilan, dalam hal ini pengadilan agama.

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".

Perceraian yang dilakukan di depan pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian sebab sebelum ada keputusan terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami dan istri. Dapat ditambahkan, perceraian yang dilakukan dimuka pengadilan akan dapat memperkecil jumlah perceraian.⁴

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Ibid*, hal 92

Menurut hukum Islam, setelah terjadinya perceraian yang dilakukan di hadapan pengadilan, maka bekas suami mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan kepada bekas istri yang diceraikan,⁵ diantaranya adalah :

- a. Memberi Mut'ah (memberi untuk menggembirakan hati) kepada bekas istrinya.

Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberi mut'ah pada bekas istrinya itu. Mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) : 241, yang menyatakan :

“ Untuk perempuan-perempuan yang ditalak berikanlah mut'ah itu, maka boleh dimintakan keputusan kepada hakim untuk menentukan kadar dari mut'ah tersebut dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan, kondisi dan kedudukan suami”.

- b. Memberi Nafkah.

Nafkah disini adalah pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam masa iddah. Apabila habis masa iddahnya maka habislah kewajiban memberi nafkahnya,. Pakaian dan tempat kediaman, sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Talaq (65) :

6, yang menyatakan :

“ Berikanlah mereka itu (perempuan yang ditalak) tempat kediaman seperti tempat kediaman kamu dari kekayaan kamu. Menurut ayat ini suami wajib memberi tempat kediaman untuk istri yang telah ditalak, sedangkan memberi makanan dan pakaian dikiaskan kepadanya”.

- c. Membayar atau Melunasi Mas Kawin


⁵ Mohd. Idris Ramulyo, Op. Cit, Hal 115.

Membayar atau melunasi mas kawin, apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin tersebut.

d. Membayar Nafkah untuk Anak-Anaknya

Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya, maka ia wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kondisi dan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak-anak itu harus terus-menerus sampai anak baligh dan mempunyai penghasilan tetap. Hal ini sesuai dengan al-qur'an yang menyatakan : Kalau mereka itu (bekas istri) mempunyai anak, maka berilah upah mereka itu.

Berkaitan dengan pemberian mut'ah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 241:


 وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Jadi di dalam ayat tersebut diatas dipeoleh ketentuan bahwa suami wajib memberikan “mut'ah” atau uang hiburan perceraian kepada istrinya, disamping nafkah iddah jumlah mut'ah ini adalah disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkan pihak suami.⁶

⁶ Soemiyati, SH, 1986, “*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*”, edisi ke 2, Yogyakarta : Liberty, Hal 124

Dengan adanya pemberian tersebut diharapkan bekas istrinya menjadi terhibur hatinya dan tidak larut dalam kesedihan, serta ekonomi akan lebih terjamin dengan adanya pemberian tersebut.

Manakala suatu peraturan dalam masyarakat apapun bentuknya sudah tidak lagi mempunyai wibawa dan tidak lagi di indahkan oleh masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek hukum tersebut, maka pandangan yang akan terlihat berikutnya adalah ketidak teraturan dan kesemerawutan dalam masyarakat.

Oleh karenanya, menyajikan peraturan hukum yang dapat menjawab perubahan dan perkembangan zaman merupakan suatu keharusan dan sangat mendesak. Hal ini karena pola perubahan hukum dan peraturan senantiasa berkembang berdasarkan kebutuhan modernisasi.

Hal itu yang menjadi salah satu alasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan No. 441 K/ AG/ 1996, yang pada intinya membatalkan dan menganulir keputusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 20 Mei 1996 dengan No. 03/Pdt./9/PP. Smd. Yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda No. 257/Pdt.G/1995/PA Smd.

Selain itu, ada salah satu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 441 K/ AG/ 1996 yang sangat menarik untuk dikaji yaitu : Jika permohonan perceraian diajukan oleh suami sebagai pemohon, sedangkan faktor penyebab retaknya rumah tangga dari hasil pemeriksaan dalam sidang adalah pemohon sendiri, maka pemohon wajib memberi nafkah kepada

mantan istrinya (termohon) selama belum menikah lagi. Hal ini sesuai dengan pokok pembahasan penelitian dan juga sesuai dengan pokok perkara yang terdapat pada putusan tersebut.

Yurisprudensi yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai pengaruh yang teramat kuat terhadap putusan-putusan yang diambil oleh institusi pengadilan dibawahnya, meski hal tersebut tidak mengikat secara ketat.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat dipahami bahwa masalah mut'ah telah dijelaskan dalam hukum Islam dan hukum perkawinan. Namun menurut pengamatan penulis sejauh ini belum ditentukan batas minimal dan batas maximum pemberian mut'ah baik ditingkat pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama maupun ditingkat Mahkamah Agung.

Pertama, masalah mut'ah belum mendapat tempat dan perhatian yang khusus dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung.

Kedua, mut'ah dimunculkan atau dibacakan dalam suatu bidang perceraian ketika hakim telah menetapkan putusan perkawinan suami istri tersebut dengan suatu putusan.

Ketiga, kadar mut'ah disesuaikan dengan kemampuan suami dan berdasarkan pertimbangan hakim yang mengenai kasus perceraian tersebut.

Dengan adanya latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN MUT’AH DALAM PUTUSAN MA RI NO. REG. 441 K/ AG/1996”.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah sebenarnya merupakan upaya mengkhususkan tentang suatu masalah berdasarkan hal tersebut serta terbatasnya penulis, maka lingkup pembahasannya perlu dibatasi guna tercapainya sasaran dari judul tersebut. Maka yang menjadi fokus pembahasan dari penelitian ini, yaitu Tinjauan Hukum Islam mengenai Mut’ah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 441 K/AG/1996.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan untuk menjadi pedoman pembahasannya. Adapun perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan Mut’ah ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimana analisis putusan MA RI No. Reg 441 K/ AG/ 1996 mengenai pemberian mut’ah tinjauan hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 441 K/ AG/ 1996 tentang mut'ah.
2. Untuk mengetahui sejauhmana hukum Islam mengatur tentang pemberian mut'ah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat dalam bidang ilmu hukum khususnya bagian hukum Islam.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber pustaka dalam memberi informasi kepada masyarakat umum dan mahasiswa khususnya. Dan sebagai rujukan dan referensi para pemerhati dan praktisi hukum yang ingin berkembang dan mengembangkan hukum di Republik Indonesia ini.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian, termasuk di dalam skripsi selalu memakai metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrument penting dalam penelitian agar terlaksana dengan rasional dan terarah, sehingga tercapailah hasil yang optimal. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini yaitu;

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis digunakan untuk mengetahui dalil-dalil, baik al-qur'an maupun sunnah tentang mut'ah dan kitab-kitab fiqh konvensional. Sedangkan dalam pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan No. 441 K/ AG/ 1996 mengenai pemberian mut'ah.⁷

2. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Tindakan Hukum Islam terhadap Pemberian mut'ah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 441 K/ AG/ 1996, termasuk dalam jenis penelitian *Library Research*, yaitu suatu jenis penelitian yang didalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka baik berupa buku maupun penelitian. Misalnya untuk mendeskripsikan mut'ah dapat diperoleh dari

⁷ Amiruddin, 2004, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

kitab-kitab fiqh maupun buku-buku yang sudah ada, kemudian untuk mengetahui seberapa jauh wewenang Mahkamah Agung dapat diperoleh dari buku-buku yang berisi mengenai hal itu.

3. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan maka dalam hal penulisan skripsi akan mengutamakan dengan menggunakan sumber data tertulis. Maka sumber digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data baik data primer maupun sekunder :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, dengan penelitian langsung pada obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu berupa :

- 1) Al-Qur'an
- 2) Al-Hadits
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1997
- 5) Buku, artikel yang mendukung dengan masalah yang diteliti

4. Metode Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data

dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, makalah, surat kabar, majalah, artikel, internet hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Semua ini dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian.⁸

b. Pengumpulan Data Primer

Wawancara, merupakan hal penting untuk memperoleh data primer, dengan menanyakan hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh data-data yang lebih mendalam yaitu wawancara langsung dengan responden yakni hakim Pengadilan Agama, ulama dan pihak pemberi mut'ah dan penerima mut'ah.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Yakni dengan metode induktif yaitu metode berfikir yang berangkat dari dimensi yang khusus selanjutnya digeneralisasi dengan semua dimensi.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami dalam penyusunan skripsi ini, agar lebih terarah dan sistematis, maka penulis membagi sistematika penulisan sebagai berikut :

⁸ Khuzaifah Dimyati, Kelik Wardiono, 2004, "*Metodologi Penelitian Hukum*", UMS Press: Surakarta, Hal 57

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penelitian

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Tujuan Perkawinan
 - 3. Syarat Syahnya Perkawinan
 - 4. Rukun Perkawinan
- B. Tinjauan Umum Tentang Mut'ah
 - 1. Pengertian Mut'ah
 - a. Menurut Hukum Islam
 - b. Menurut Hukum Positif
 - 2. Mut'ah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - 3. Ukuran Dalam Menentukan Jenis dan Jumlah Pemberian Mut'ah Dalam Islam
 - 4. Alasan Mengapa Orang Diberi Mut'ah
 - 5. Pendapat Ulama Tentang Pemberian Mut'ah

C. Posisi dan Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Terkait Dalam Lingkungan Peradilan Agama

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penelitian

1. Bagaimana Ketentuan mut'ah ditinjau dari Hukum Islam?
2. Bagaimana Analisis Putusan MA RI No. Reg. 441 K/ AG/ 1996 Mengenai Pemberian Mut'ah Tinjauan Hukum Islam?

B. Pembahasan

1. Bagaimana ketentuan Mut'ah ditinjau dari Hukum Islam?
2. Bagaimana Analisis Putusan MA RI No. Reg. 441 K/ AG/ 1996 Mengenai Pemberian Mut'ah Tinjauan Hukum Islam?

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA